



**Judul** : 'Pertanyaan Survei Bisa Diperbaiki'  
**Tanggal** : Jumat, 30 Juli 2021  
**Surat Kabar** : Republika  
**Halaman** : 3

## 'Pertanyaan Survei Bisa Diperbaiki'

■ INAS WIDYANURATIKAH,  
FEBRIANTO ADI SAPUTRO

JAKARTA — Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbangbuk) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Anindito Aditomo mengakui, survei lingkungan belajar yang sempat diuji coba kepada sekolah penggerak masih akan dievaluasi. Hasil akhir evaluasi nantinya akan digunakan untuk survei lingkungan belajar pada asesmen nasional (AN).

"Betul (bisa berubah). Seperti saya sampaikan kemarin, instrumen survei secara prinsip memang terus dievaluasi dan disesuaikan berdasarkan data dan masukan," kata Anindito, saat dihubungi *Republika*, Kamis (29/7).

Ia menjelaskan, uji coba survei yang dilakukan pada sekolah penggerak ini adalah tahapan terakhir. Tahapan ini termasuk pada uji coba empiris, yakni menguji coba survei kepada responden yang mirip dengan responden AN nantinya.

Adapun tahapan pembuatan instrumen survei, dia menjelaskan, diawali dengan membuat kerangka asesmen. Kerangka asesmen ini

mendefinisikan tujuan pengukuran, seperti mengapa pengukuran dilakukan dan apa saja yang akan diukur.

Setelah itu, Kemendikbudristek lalu melakukan kajian pustaka untuk menyusun indikator-indikator dan butir spesifikasinya. Jika sudah ada instrumen, literatur bisa digunakan dan disesuaikan dengan konteks yang akan diukur. Tahapan selanjutnya adalah membuat draf awal, yang juga sebagai evaluasi.

Setelah semuanya selesai, akhirnya adalah uji coba yang salah satunya dilakukan pada sekolah penggerak. Instrumen-instrumen survei inilah yang saat ini beredar di masyarakat, khususnya di kalangan sekolah penggerak. Survei lingkungan belajar yang dilakukan Kemendikbudristek mendapat kritikan sejumlah pihak. Bahkan, guru-guru yang menjadi responden ikut mendesak pertanyaan survei diperbaiki.

Pertanyaan dalam survei dinilai kontroversial dan bermuatan politis. Pertanyaan dalam survei dinilai kontroversial dan bermuatan politis. Misalnya, 'Presiden lebih baik dijabat seorang laki-laki daripada perempuan', 'Orang dari kelompok mayoritas agama lebih berhak menjadi pemimpin politik seperti bupati/-

walikota, gubernur dan presiden'. Contoh lainnya yang tak kalah kontroversial yakni, 'Rumusan Pancasila sebaiknya diubah agar lebih sesuai dengan ajaran agama.' Selain itu juga ada pertanyaan, 'Lebih baik kalau ketua OSIS berasal dari agama yang mayoritas di sekolah', 'Cara berpakaian sesuai aturan agama kelompok mayoritas seharusnya diwajibkan bagi warga sekolah'.

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makariem untuk meninjau ulang survei lingkungan belajar. Ia menilai, hal tersebut justru dinilai lebih bermuatan politis dan SARA.

"Alih-alih memberi gambaran lengkap terhadap kondisi lingkungan belajar terhadap peserta didik kita, survei ini malah seperti survei jelang pilpres," ujar Fikri.

Anggota Komisi X DPR Fraksi PAN, Zainuddin Maliki, mengatakan, seharusnya survei lingkungan belajar didasarkan kepada kepentingan untuk memetakan latar belakang tempat berlangsungnya pendidikan. Zainuddin secara tegas meminta Menteri Dikbudristek menarik kuisisioner itu. ■ **ed:** agus raharjo